



**bkpsdm**

---

# **SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

---

Semester II Tahun 2023

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**KABUPATEN SUMENEP**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2023 terhadap Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dapat diselesaikan. Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2023 ini dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat diketahui Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun tujuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2023 ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara objektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, selain itu juga untuk mendapatkan informasi tentang unsur-unsur apa saja dalam penyelenggaraan pelayanan yang dinilai oleh masyarakat masih kurang baik sehingga hasil Survei ini dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka upaya perbaikan pelayanan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2023 ini belumlah menunjukkan tingkat kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan sangat diharapkan.

Semoga melalui laporan ini dapat dijadikan pedoman dan bahan evaluasi lebih lanjut dalam upaya upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah di masa yang akan datang.

**DAFTAR ISI**

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR .....  | i   |
| DAFTAR TABEL .....  | iii |
| BAB I .....   | 1   |
| PENDAHULUAN.....  | 1   |
| A. Latar Belakang .....   | 1   |
| B. Dasar Hukum .....  | 2   |
| C. Tujuan .....   | 3   |
| BAB II.....   | 4   |
| PENGUMPULAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT.....                    | 4   |
| A. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat .....                           | 4   |
| B. Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) .....                 | 4   |
| C. Lokasi dan Jadwal Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) .....         | 5   |
| D. Metode Pengumpulan Data .....                                    | 5   |
| E. Metode Penelitian Periode Survei.....                            | 7   |
| F. Metode Pengolahan Data .....                                     | 9   |
| BAB III .....   | 11  |
| HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT .....              | 11  |
| A. Analisis Responden .....   | 11  |
| B. Analisis Unsur Layanan.....                                      | 15  |
| C. Hasil Penyusunan Indeks.....                                     | 18  |
| BAB IV .....  | 20  |
| ANALISIS HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT .....                     | 20  |
| A. Analsis Permasalahan Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan ..... | 20  |
| B. Rencana Tindak Lanjut.....                                       | 20  |
| C. Tren Nilai SKM .....   | 21  |
| BAB V .....   | 22  |
| PENUTUP.....  | 22  |
| A. Kesimpulan.....  | 22  |
| B. Rekomendasi.....   | 22  |

---

## DAFTAR TABEL

| Tabel. | Judul Tabel  | Hal |
|--------|--|-----|
| 1      | Tabel Responden <i>Krejcie and Morgan</i>  | 8   |
| 2      | Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konvensi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan | 10  |
| 3      | Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Umur   | 11  |
| 4      | Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  | 12  |
| 5      | Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Pendidikan   | 13  |
| 6      | Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Pekerjaan  | 14  |
| 7      | Hasil Kuesioner Evaluasi Pelayanan   | 17  |
| 8      | Unsur dan Nilai Pelayanan  | 18  |

## DAFTAR GAMBAR

| No. | Judul Gambar                                      | Hal |
|-----|---|-----|
| 1   | Grafik Responden Berdasarkan Usia                 | 12  |
| 2   | Grafik Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 13  |
| 3   | Grafik jumlah Responden berdasarkan pendidikan    | 14  |
| 4   | Grafik jumlah Responden berdasarkan pekerjaan     | 15  |
| 5   | Grafik Nilai unsur pelayanan                      | 16  |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara Negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/ atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu

1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah,
2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan.
3. Kepuasan yang diberikan dan/atauditerima oleh penerima layanan (pelanggan).

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai *regulator*/pembuat peraturan (*rule government*/peraturan pemerintah) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat untuk terwujudnya *good governance*, dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan..

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, sangat dibutuhkan kritik, saran, pendapat, serta aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan publik yang dilaksanakan. Kritik, saran, pendapat, serta aduan dari masyarakat inilah yang menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan publik pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diikuti Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam Peraturan MENPANRB RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Menteri Nomor 16

Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membantu Bupati dalam bidang kepegawaian wajib ikut serta mewujudkan visi kabupaten Sumenep melalui misi yang ke-3 (tiga), yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat”** dengan tujuan: “Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif” dengan menggunakan indikator kinerja utama berupa *Indeks Reformasi Birokrasi (RB)*.

Sasaran dari misi ke-3 ini adalah meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis E-government melalui pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara pemerintah daerah sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan. Ada pun indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mendukung proses mewujudkan misi ke-3 ini antara lain : Indeks SPBE, Nilai IKM, Indeks Profesional Aparatur, Nilai SAKIP, Opini Atas Audit BPK, dan Tingkat Maturitas SPIP.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Permenpan RB Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Mystery Shopping Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

### C. Tujuan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) penyelenggaraan pelayanan publik dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.
2. Memperoleh gambaran secara objektif mengenai kepuasan masyarakat maupun instansi/unit terkait selaku pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.
3. Sebagai dasar pijakan dalam rangka menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat/unit terkait di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.
4. Sumber informasi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat tentang layanan yang efektif dan efisien.

## BAB II

# PENGUMPULAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

### A. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. **Transparan**, Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
2. **Partisipatif**, Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3. **Akuntabel**, Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
4. **Berkesinambungan**, Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
5. **Keadilan**, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
6. **Netralitas**, Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, Surveior tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

### B. Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep tahun 2023 dilaksanakan secara swakelola yang dengan membentuk Tim Survei beranggotakan yang terdiri dari :

1. *Penanggung Jawab/Pengarah* dalam kegiatan Survei ini, adalah dengan jabatan Sekretaris dengan tugas mengarahkan dan bertanggungjawab terhadap seluruh proses survei kepuasan masyarakat (SKM).
2. *Ketua* dalam kegiatan Survei ini yaitu jabatan Sub Koordinator Bagian

Umum, Kearsipan dan Kepegawaian dengan tugas mengelola kegiatan secara teknis dan menyeluruh.

3. *Anggota* merupakan unsur dari seluruh staf yang ada di Subbag Umum, Kearsipan dan Kepegawaian sebanyak 2 orang dengan tugas untuk menyampaikan dan mengumpulkan kuesioner survei kepuasan masyarakat (SKM) Tahun 2023 (Semester II).

### C. Lokasi dan Jadwal Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Lokasi yang digunakan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat adalah di Ruang Layanan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Jadwal pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2023 merupakan satu rencana yang berisikan waktu dan urutan dalam melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, untuk jadwal Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah sebagai berikut :

1. Minggu pertama bulan Juli menyiapkan *link* Kuesioner melalui *Google Form* yang kemudian link tersebut di *print* dan di tempatkan di ruang layanan yang dimaksudkan apabila ada tamu yang datang untuk konsultasi layanan di BKPSDM Kabupaten Sumenep bisa langsung mengisi Survei dengan cara Scan QR Code atau langsung membuka *link* yang sudah disediakan.
2. Minggu pertama bulan Desember menyebar kuesioner secara online (google form) melalui Grup Whats App seluruh OPD terutama Grup Operator BKPSDM yang anggotanya merupakan pengguna layanan BKPSDM Kabupaten Sumenep yang tersebar di setiap OPD sehingga responden lebih merata dan efektif
3. Minggu kedua bulan Desember mengolah data hasil kuesioner
4. Minggu Ketiga bulan Desember menyusun laporan
5. Minggu Ketiga bulan Juni Evaluasi hasil laporan

### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data untuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), kuesioner disusun berdasarkan ketentuan Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penyusunan Survei kepuasan masyarakat (SKM) dengan bagian kuesioner sebagai berikut :

Bagian penyusunan kuesioner Survei kepuasan masyarakat (SKM) secara umum, terbagi dalam 3 (tiga) bagian sebagai berikut :

1. Bagian Pertama Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survei.

2. Bagian Kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom nama OPD/Instansi responden saat disurvei.
3. Bagian Ketiga Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur erisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi. Pada bagian ini mengandung Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner yaitu :
  1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
  2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
  3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
  4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
  5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
  6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
  7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
  8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
  9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses layanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk

pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. baik, diberi nilai 3;
4. sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh : Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

#### **E. Metode Penelitian Periode Survei**

Metode penelitian dalam survei kepuasan masyarakat survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (Semester) atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali.

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa Survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan *trend* layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit

pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan**

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

dimana

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = lambada (factor pengali) dengan

dk = 1 taraf kesalahan bisa 1%, 5% 10%

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0

Tabel 1  
Tabel Responden *Krejcie and Morgan*

| N   | S   | N   | S   | N    | S   | N      | S   |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|-----|
| 10  | 10  | 150 | 108 | 460  | 210 | 2000   | 322 |
| 15  | 14  | 160 | 113 | 480  | 214 | 2200   | 327 |
| 20  | 19  | 170 | 118 | 500  | 217 | 2400   | 331 |
| 25  | 24  | 180 | 123 | 550  | 226 | 2600   | 335 |
| 30  | 28  | 190 | 127 | 600  | 234 | 2800   | 338 |
| 35  | 32  | 200 | 132 | 650  | 242 | 3000   | 341 |
| 40  | 36  | 210 | 136 | 700  | 248 | 3500   | 346 |
| 45  | 40  | 220 | 140 | 750  | 254 | 4000   | 351 |
| 50  | 44  | 230 | 144 | 800  | 260 | 4500   | 354 |
| 55  | 48  | 240 | 148 | 850  | 265 | 5000   | 357 |
| 60  | 52  | 250 | 152 | 900  | 269 | 6000   | 361 |
| 65  | 56  | 260 | 155 | 950  | 274 | 7000   | 364 |
| 70  | 59  | 270 | 159 | 1000 | 278 | 8000   | 367 |
| 75  | 63  | 280 | 162 | 1100 | 285 | 9000   | 368 |
| 80  | 66  | 290 | 165 | 1200 | 291 | 10000  | 370 |
| 85  | 70  | 300 | 169 | 1300 | 297 | 15000  | 375 |
| 90  | 73  | 320 | 175 | 1400 | 302 | 20000  | 377 |
| 95  | 76  | 340 | 181 | 1500 | 306 | 30000  | 379 |
| 100 | 80  | 360 | 186 | 1600 | 310 | 40000  | 380 |
| 110 | 86  | 380 | 191 | 1700 | 313 | 50000  | 381 |
| 120 | 92  | 400 | 196 | 1800 | 317 | 75000  | 382 |
| 130 | 97  | 420 | 201 | 1900 | 320 | 100000 | 384 |
| 140 | 103 | 440 | 205 |      |     |        |     |

Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 6 bulan adalah sebanyak 330 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 178 orang

**F. Metode Pengolahan Data**

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert.

Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayan, dalam perhitungan SKM terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

untuk memperoleh Nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

|     |   |                                     |   |                 |
|-----|---|-------------------------------------|---|-----------------|
| SKM | = | Total dari Nilai Persepsi per unsur | x | Nilai Penimbang |
|     |   | Total Unsur yang Terisi             |   |                 |

untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk :

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan.
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap

Tabel. 2  
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konvensi, Mutu  
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan.

| Nilai Persepsi | Nilai Interval SKM | Nilai Interval Konversi SKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1              | 1,00 – 2,5996      | 25,00 – 64,99               | D              | Tidak Baik             |
| 2              | 2,60 – 3,064       | 65,00 – 76,60               | C              | Kurang Baik            |
| 3              | 3,0644 – 3,532     | 76,61 – 88,30               | B              | Baik                   |
| 4              | 3,5324 – 4,00      | 88,31– 100,00               | A              | Sangat Baik            |

**BAB III**  
**HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN**  
**MASYARAKAT**

**A. Analisis Responden**

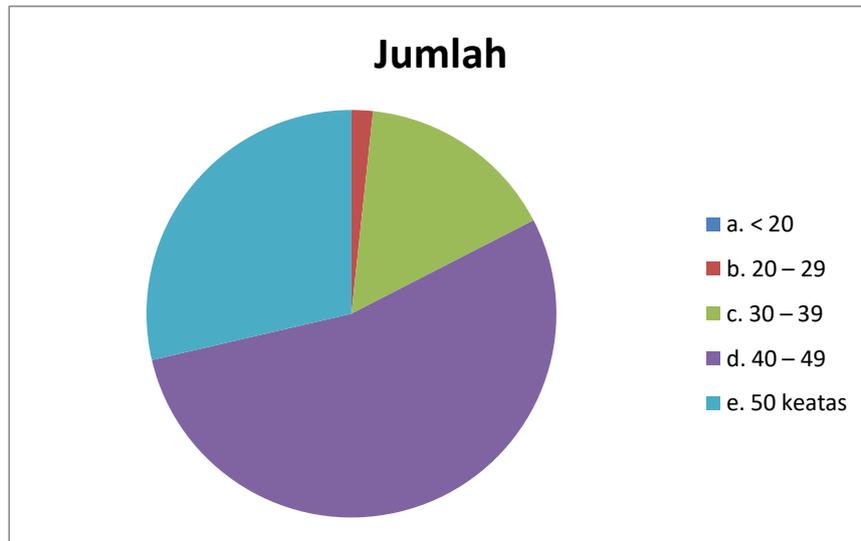
Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dilaksanakan, dari data responden yang telah disampaikan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3  
Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Umur (tahun)

| No | Umur         | Jumlah     |
|----|--------------|------------|
| a. | < 20         | 0          |
| b. | 20 – 29      | 3          |
| c. | 30 – 39      | 28         |
| d. | 40 – 49      | 96         |
| e. | 50 keatas    | 51         |
|    | <b>Total</b> | <b>178</b> |

Berdasarkan rekapitulasi data responden pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berusia diantara 40-49 tahun yaitu 96 orang, Untuk responden diatas 50 Tahun sebanyak 51 orang, 30-39 tahun sebanyak 28 orang, dan untuk usia 20-29 tahun sebanyak 3 orang terlihat pada Gambar 1.1

Gambar 1 Grafik Responden berdasarkan usia

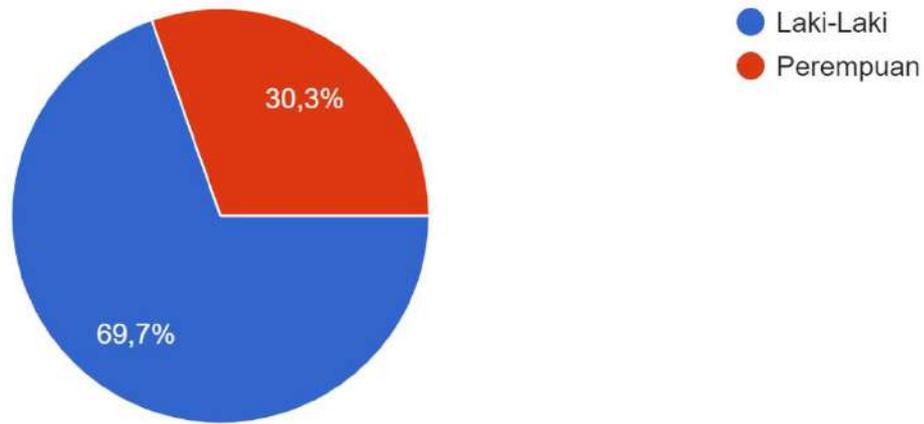


Dalam penyampaian kuesioner terhadap layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep berdasarkan jenis kelamin secara keseluruhan di dominasi oleh laki-laki sebanyak 124 orang responden dari total sebanyak 178 orang dan untuk responden perempuan yang sebanyak 54 orang responden sebagaimana dapat di lihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel .4  
Rekapitulasi Data Responden  
Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Data   | Jumlah     |
|----|--------------|------------|
| a. | Laki - laki  | 124        |
| b. | Perempuan    | 54         |
|    | <b>Total</b> | <b>178</b> |

Dari tampilan gambar 2 grafik jumlah responden berdasarkan jenis kelamin bahwa 69,7% jenis kelamin responden laki – laki mendominasi dalam pengisian kuesioner dan dan untuk perempuan sebanyak 30,3% sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah



Gambar 2  
 Grafik Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

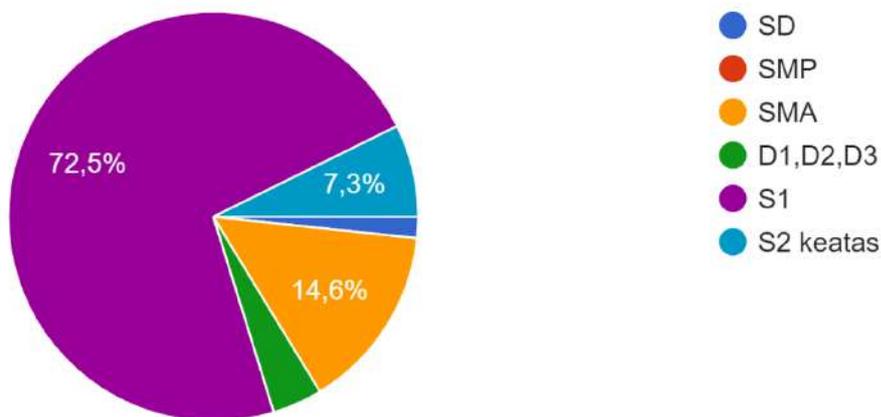
Dalam pengisian kuesioner terhadap unit layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan pendidikan S-1 yang mendominasi dan untuk pendidikan SD, SMP, dan SMA tidak terdapat responden yang mengisi kuesioner sebagaimana tergambar pada tabel 6

Tabel .5  
 Rekapitulasi Data Responden  
 Berdasarkan Pendidikan

| No | Jenis Data   | Jumlah     |
|----|--------------|------------|
| a. | SD           | 3          |
| b. | SMP          | 0          |
| c. | SMA          | 26         |
| d. | D1,D2,D3     | 7          |
| f. | S-1          | 129        |
| g  | S-2 ke atas  | 13         |
|    | <b>Total</b> | <b>178</b> |

Dalam melihat perkembangan pelayanan yang dilaksanakan oleh unit layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dari grafik menunjukkan bahwa responden pendidikan S-1 dengan jumlah responden terbanyak yakni sebanyak 129 orang responden atau 72,5% ini menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan S-1 mendominasi dalam pengisian kuesioner sedangkan untuk SMA sebanyak 14,6%, D1,D2,D3 sebanyak 3,93 %, untuk SD sebanyak 1,69 % serta responden dengan data responden pendidikan S2 keatas sebanyak 7,3%, untuk melihat perkembangan responden berdasarkan pendidikan

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



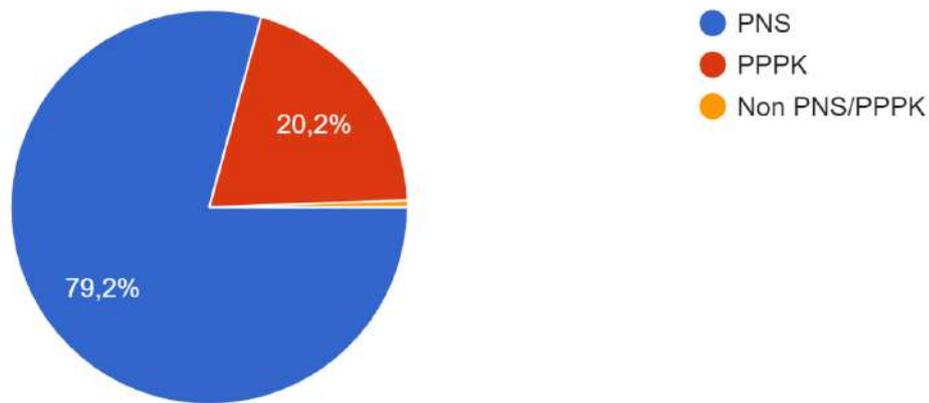
Gambar 3  
Grafik jumlah Responden berdasarkan pendidikan

Responden yang pernah mendapatkan layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep berdasarkan pekerjaan yang di dominasi oleh PPPK. Data tersebut dapat dilihat dari tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6  
Rekapitulasi Data Responden  
Berdasarkan Pekerjaan

| No | Jenis Data   | Jumlah     |
|----|--------------|------------|
| a. | PNS          | 141        |
| b. | PPPK         | 36         |
| c. | Non PNS/PPPK | 1          |
|    | <b>Total</b> | <b>178</b> |

Berdasarkan gambar 4 di bawah ini, jumlah responden berdasarkan pekerjaan yang pernah mendapatkan layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan jumlah total sebanyak 178 responden, dengan jumlah reponden yang paling terbanyak adalah PNS sebanyak 141 orang atau sebesar 79,2%, responden PPPK sebanyak 36 orang atau sebesar 20,2% dan resposden Non PNS/PPPK sebanyak 1 orang atau sebesar 0,6%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4 Grafik jumlah Responden berdasarkan pekerjaan

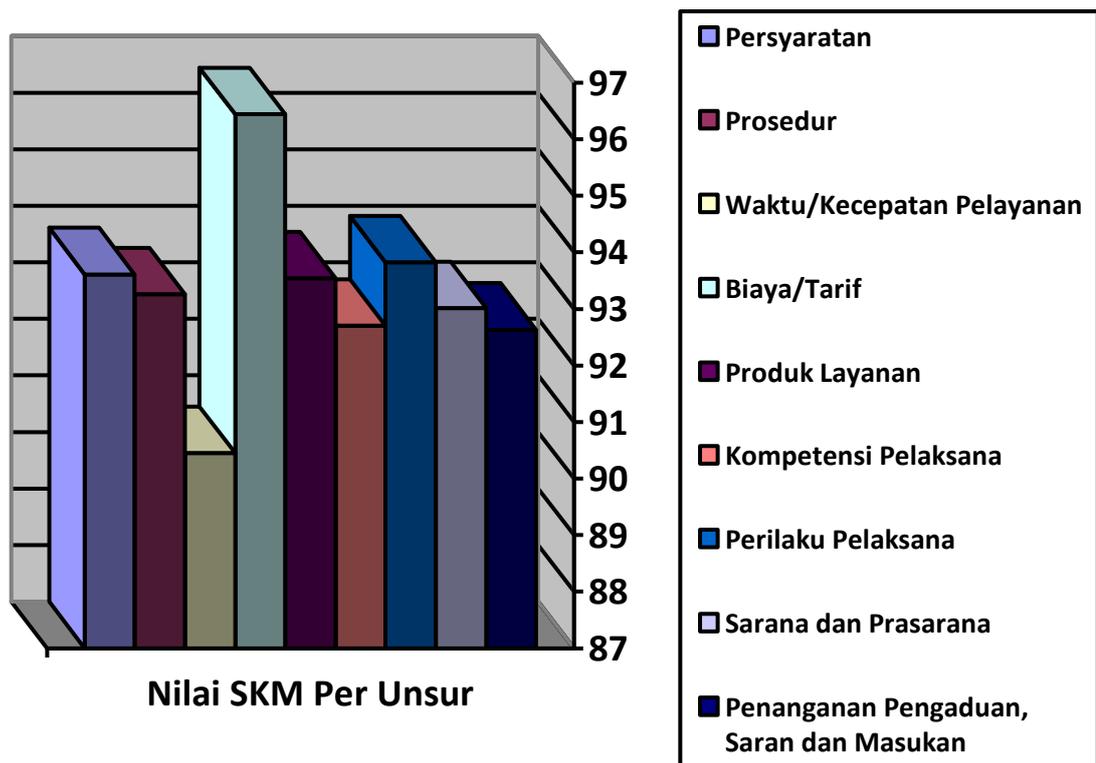
## B. Analisis Unsur Layanan

Dalam menyusun analisis Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di unit pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada Semester II (Juli s/d Desember) tahun 2023 dapat diuraikan berdasarkan Unsur Layanan sebagai berikut :

- *Persyaratan pelayanan*, yang merupakan salah satu dalam unsur pelayanan dengan nilai 3,744 telah dikonversikan didapat nilai sebesar **93,61** dengan kategori **Sangat Baik** ini menunjukkan bahwa persyaratan yang di ajukan dalam pelayanan di BKPSDM Kabupaten Sumenep dapat dikatakan baik.
- *Prosedur pelayanan*, dari hasil survei kepuasan masyarakat nilai unsur pelayanan dengan prosedur pelayanan dapat dikategorikan baik dengan nilai sebesar 3,730 dengan nilai telah dikonversikan sebesar **93,26** dengan kategori **Sangat Baik** ini menunjukan bahwa prosedur pelayanan di BKPSDM Kabupaten Sumenep dapat dikatakan baik.
- *Waktu/Kecepatan Pelayanan*, dari hasil survei kepuasan masyarakat waktu pelayanan dengan nilai unsur pelayanan 3,618 dengan nilai yang telah konversikan sebesar **90,45** dengan mutu pelayanan di kategorikan **Sangat Baik** ini menunjukkan bahwa waktu dalam melaksanakan pelayanan dapat di kategorikan baik.
- *Biaya Tarif Layanan*, berdasarkan hasil survei dengan nilai unsur pelayanan sebesar 3,858 setelah di konversikan didapati nilai mutu pelayanan sebesar **96,44** dengan kategori **Sangat Baik**, ini menunjukkan bahwa responden menilai biaya tarif layanan sangat baik karena layanan di unit pelayanan BKPSDM Kabupaten Sumenep tidak mengenakan biaya setiap pelayanan.
- *Produk Pelayanan*, dari hasil perhitungan SKM nilai unsur pelayanan

sebesar 3,742 dengan nilai mutu pelayanan setelah di konversikan sebesar **93,54** dengan kategori **Sangat Baik**, ini menunjukkan bahwa responden menilai produk pelayanan dianggap baik.

- *Kompetensi Pelaksana*, berdasarkan perhitungan SKM nilai unsur pelayanan sebesar 3,708 dengan nilai mutu **92,70** yang dapat di kategorikan **Sangat Baik**, ini menunjukkan bahwa kemampuan, wawasan dan sikap pelaksana unit pelayanan BKPSDM Kabupaten Sumenep dapat di anggap baik.
- *Perilaku Pelaksana*, dari hasil perhitungan SKM nilai unsur pelayanan sebesar 3,753 dengan nilai mutu pelayanan setelah di konversikan sebesar **93,82** dengan kategori **Sangat Baik**, ini menunjukkan bahwa responden menilai perilaku pelaksanapelayanan dianggap baik.
- *Sarana dan Prasarana*, dari hasil survei kepuasan masyarakat dengan nilai unsur pelayanan sebesar 3,720 dengan konversi nilai sebesar **93,01** dengan kategori **Sangat Baik**, ini menunjukkan bahwa responden menilai penanganan pengaduan, sarana dan masukan dalam pelayanan dapat di anggap baik.
- *Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan*, berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat nilai unsur pelayanan sebesar 3,705 dengan nilai yang telah di konversi sebesar **92,63** dengan kategori **Sangat Baik**, ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan di BKPSDM Kabupaten Sumenep dapat di katakan sangat baik.



Gambar 5 Grafik Nilai unsur pelayanan

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Semester II ini menunjukkan bahwa 9 unsur pelayanan mendapat predikat *Sangat Baik*. ini menunjukkan bahwa pelayanan di unit-unit pelayanan di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sumenep pada Semester II sangat memuaskan bagi masyarakat umumnya dan ASN pada khususnya.

Tingginya nilai 9 (sembilan) unsur pelayanan menunjukkan bahwa responden menilai secara umum layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sangat baik, ini di karena unit pelayanan telah sesuai dengan standar pelayanan.

Secara keseluruhan, nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di BKPSDM Kabupaten Sumenep untuk Semester II (Juli s/d Desember) tahun 2023 dengan nilai indeks **3,694**. Apabila nilai tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 maka hasilnya adalah **92,340**. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di BKPSDM Kabupaten Sumenep adalah **A**, ini berarti bahwa kinerja pelayanan di BKPSDM Kabupaten Sumenep adalah **Sangat Baik**.

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan dari 9 (sembilan) indikator hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 3,694 x 25 = 92,340
- 2) Mutu Pelayanan A
- 3) Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep **“Sangat Baik”**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Sumenep telah menunjukkan tren positif. Hal ini terbukti dari terus meningkatnya nilai IKM BKPSDM Kabupaten Sumenep Semester II tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 7 Di bawah ini.

Tabel. 7  
Hasil Kuesioner Evaluasi Pelayanan

| No. | UNSUR PELAYANAN           | Nilai Unsur Pelayanan | NRR Tertimbang | Nilai Mutu Pelayanan | Mutu Pelayanan |
|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| U1  | Persyaratan Pelayanan     | 3,744                 | 25,00          | 93,61                | Sangat Baik    |
| U2  | Prosedur Pelayanan        | 3,730                 | 25,00          | 93,26                | Sangat Baik    |
| U3  | Waktu/Kecepatan Pelayanan | 3,618                 | 25,00          | 90,45                | Sangat Baik    |
| U4  | Biaya Tarif Layanan       | 3,858                 | 25,00          | 96,44                | Sangat Baik    |
| U5  | Produk Pelayanan          | 3,742                 | 25,00          | 93,54                | Sangat Baik    |

|    |  |              |              |              |                    |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| U6 | Kompetensi Pelaksana                     | 3,708        | 25,00        | 92,70        | Sangat Baik        |
| U7 | Perilaku Pelaksana                       | 3,753        | 25,00        | 93,82        | Sangat Baik        |
| U8 | Sarana dan Prasarana                     | 3,720        | 25,00        | 93,01        | Sangat Baik        |
| U9 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan | 3,705        | 25,00        | 92,63        | Sangat Baik        |
|    | <b>IKM unit Pelayanan</b>                | <b>3,694</b> | <b>25,00</b> | <b>92,34</b> | <b>Sangat Baik</b> |

### C. Hasil Penyusunan Indeks

Hasil akhir kegiatan Survei kepuasan masyarakat (SKM) yang dilaksanakan pada setiap pelayanan OPD di susun dengan materi utama. Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu **0,11**

Tabel .8

#### Unsur dan Nilai Pelayanan

(Semester II Juli s/d Desember Tahun 2023)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Sumenep

| NO | UNSUR PELAYANAN                         | NILAI UNSUR PELAYANAN |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Persyaratan Pelayanan                   | 3,744                 |
| 2. | Prosedur Pelayanan                      | 3,730                 |
| 3. | Waktu/Kecepatan Pelayanan               | 3,618                 |
| 4. | Biaya/Tarif Pelayanan                   | 3,858                 |
| 5. | Produk Pelayanan                        | 3,742                 |
| 6. | Kompetensi Petugas Pelayanan            | 3,708                 |
| 7. | Perilaku Pelaksana                      | 3,753                 |
| 8. | Sarana dan Prasarana                    | 3,720                 |
| 9. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,705                 |

Dari hasil penjumlahan nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan yang telah dikalikan dengan nilai rata-rata tertimbang (0,11), maka diperoleh nilai indeks unit pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan perhitungan sebagai berikut :  $(3,744 \times 0,11) + (3,730 \times$

---

$0,11) + (3,618 \times 0,11) + (3,858 \times 0,11) + (3,742 \times 0,11) + (3,708 \times 0,11) + (3,753 \times 0,11) + (3,720 \times 0,11) + (3,705 \times 0,11)$   
 $= 3,694$  berdasarkan nilai indeks tersebut, maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai SKM setelah dikonversi =  $3,694 \times 25 = \mathbf{92,340}$
2. Mutu Pelayanan **A**
3. Kinerja Unit Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep : **Sangat Baik**

## BAB IV

### ANALISIS HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

#### A. Analisis Permasalahan Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Unsur layanan terendah yaitu : Waktu/Kecepatan Pelayanan yang mendapat nilai 3,618
2. Sedangkan Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif Layanan yang mendapat nilai 3,858

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan berbasis online sudah dilakukan, akan tetapi tahapan penerbitan Surat-surat terkait kepegawaian terkendala di proses penandatanganan surat yang selama ini di luar wewenang dari BKPSDM Kabupaten Sumenep (Misal : Untuk SK Pangkat, Mutasi, dll menunggu proses verifikasi di BKN Pusat, sehingga kecepatan/waktu layanan tergantung dari pihak di luar BKPSDM Kabupaten Sumenep) .
- Penilaian masyarakat terkait Waktu/Kecepatan layanan tergantung dengan paham tidaknya masyarakat tentang jangka waktu layanan yang langsung bisa diproses di BKPSDM Sumenep dengan layanan yang harus mendapat rekomendasi dari Instansi di luar BKPSDM Sumenep.
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan tentang beberapa layanan kepegawaian dirasa kurang intensif

#### B. Rencana Tindak Lanjut

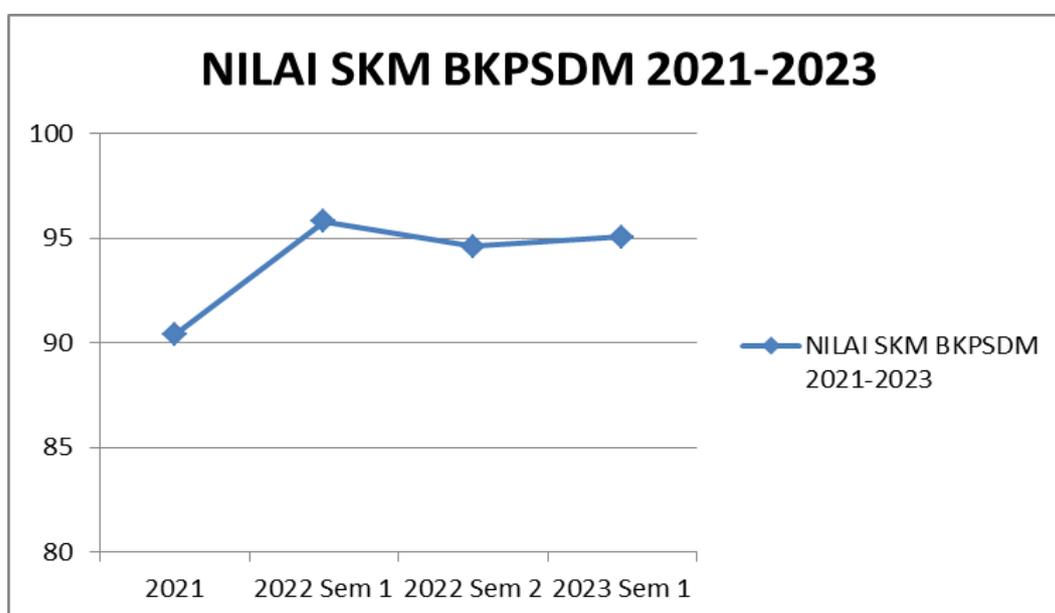
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

| No | Prioritas Unsur | Program/ Kegiatan  | Waktu |       |        |       | Penanggung Jawab |
|----|-----------------|--|-------|-------|--------|-------|------------------|
|    |                 |  | TW I  | TW II | TW III | TW IV |                  |
| 1  | Waktu Layanan   | Peningkatan Sosialisasi Tentang waktu penyelesaian tiap-tiap layanan | √     | √     | √      | √     | Setiap Bidang    |

|   |   |  |   |   |   |   |               |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|
| 2 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Menghimbau Petugas Pemberi Layanan agar lebih <i>aware terhadap pengaduan/komplain</i> | √ | √ | √ | √ | Setiap Bidang |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|

### C. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dapat dilihat melalui grafik berikut :



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) yang dilaksanakan di unit pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada Semester II (Juli s/d Desember) tahun 2023 dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Data responden yang dipergunakan dalam survei kepuasan masyarakat (SKM) sebanyak 178 orang responden yang di sebarakan pada bulan Desember tahun 2023.
2. Dari hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) pada 9 (sembilan) unsur pelayanan di unit pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep di berpredikat *Sangat Baik*.
3. Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep untuk Semester II Tahun 2023 dengan nilai indek **3,694** nilai dikonversikan sebesar **92,340**.
4. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan di BKPSDM Kabupaten Sumenep pada Semester II kategori ***Sangat Baik***.

#### B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan di BKPSDM Kabupaten Sumenep perlu lebih ditingkatkan terutama pada unsur waktu/kecepatan pelayanan dan unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang perlu ditingkatkan.

2. BKPSDM Kabupaten Sumenep sebagai salah satu OPD yang memiliki pelayanan di bidang Kepegawaian dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan Pelayanan Kepegawaian Untuk seluruh ASN di Kabupaten Sumenep demi sesuai dengan slogan “Bismillah Melayani”.

Sumenep, 15 Desember 2023

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Sumenep



**ARIF FIRMANTO, S.TP.,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19661108 198809 1 001

## Lampiran

### PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
 ALAMAT : Jl. Dr. Cipto No.40 Sumenep  
 Tlp : 0328 - 664526

| NO.<br>RESP | NILAI UNSUR PELAYANAN |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | KET  |
|-------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|             | U1                    | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | U19 |  |
| 1           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 3   | SURAT PERINTAH TUGAS                         |
| 2           | 4                     | 4  | 4  | 2  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 3   | 4   | 4   | 4   | 3   | PENINJAUAN MASA KERJA                        |
| 3           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | MUTASI DALAM DAERAH (PELAKSANA)              |
| 4           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK               |
| 5           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | SURAT PERINTAH TUGAS                         |
| 6           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS            |
| 7           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | PENINJAUAN MASA KERJA                        |
| 8           | 4                     | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS            |
| 9           | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS     |
| 10          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | PENETAPAN SK PENGANGKATAN CALON PNS          |
| 11          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS     |
| 12          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK               |
| 13          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 3   | 3   | 4   | 4   | 3   | 4   | 4   | 3   | PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN CALON PNS        |
| 14          | 4                     | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS            |
| 15          | 4                     | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | PENDISTRIBUSIAN KARIS/KARSU, KARPEG, DAN KPT |
| 16          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 3   | 4   | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS            |
| 17          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS            |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                                     |
| 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR                                  |
| 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | SURAT PERINTAH TUGAS  |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                                     |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGAJUAN IJIN CUTI BAGI PNS  |
| 23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS                              |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BELAJAR                                    |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT KEPALA DESA |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN PPPK                                      |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN CALON PNS                                   |
| 28 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS                              |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGUSULAN KARTU SUAMI (KARSU) DAN KARTU ISTRI (KARIS)                |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS                              |
| 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                                     |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                                     |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGAJUAN IJIN CUTI BAGI PNS  |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR   |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                                     |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN CALON PNS                                   |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK  |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR   |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                                     |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN PPPK                                      |
| 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN CALON PNS                                   |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                                     |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS                              |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS                              |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS                              |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                                     |
| 47 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN CALON PNS                                 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                                     |
| 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | PENYAMPAIAN BERKAS USUL PENETAPAN NI PPPK                             |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS               |
| 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR                          |
| 52 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGAJUAN IJIN CUTI BAGI PNS                           |
| 53 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS               |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN CALON PNS                  |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS               |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGUSULAN KARTU SUAMI (KARSU) DAN KARTU ISTRI (KARIS) |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 60 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | LAYANAN PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN                   |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS               |
| 63 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS                                   |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS                                   |
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS               |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 68 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS                                   |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN CALON PNS                    |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | LAYANAN PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN                   |
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS                                   |
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN CALON PNS                  |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS                          |
| 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PENGUSULAN KARTU PESERTA TASPEN (KPT)                  |
| 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK                         |
| 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PENINJAUAN MASA KERJA                                  |
| 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK                         |
| 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR                          |
| 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR                          |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS                              |
| 85  | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | SURAT PERINTAH TUGAS                              |
| 86  | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGUSULAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL (KARPEG)    |
| 87  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN CALON PNS               |
| 88  | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | PENYAMPAIAN BERKAS USUL PENETAPAN NI PPPK         |
| 89  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS          |
| 90  | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                 |
| 91  | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK                    |
| 92  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN CALON PNS               |
| 93  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK                    |
| 94  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR                     |
| 95  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK                    |
| 96  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR                     |
| 97  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGAJUAN IJIN CUTI BAGI PNS                      |
| 98  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR                     |
| 99  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS          |
| 100 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK                    |
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS                              |
| 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                 |
| 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS                              |
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGAJUAN IJIN CUTI BAGI PNS                      |
| 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS          |
| 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR                     |
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR                     |
| 108 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS                              |
| 109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR                     |
| 110 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                 |
| 111 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGAJUAN IJIN CUTI BAGI PNS                      |
| 112 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK                    |
| 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS          |
| 114 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK                    |
| 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS                              |
| 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK                    |
| 117 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | KEGIATAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN NON PROGRAM |
| 118 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS          |
| 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT                     |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | PNS   |
| 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS  |
| 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGUSULAN SATYALANCANA KARYA SATYA                                   |
| 122 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN NON PROGRAM                     |
| 123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT KEPALA DESA |
| 124 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS  |
| 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                                     |
| 126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR   |
| 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS  |
| 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK  |
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS  |
| 130 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                                     |
| 131 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN CALON PNS                                 |
| 132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGUSULAN SATYALANCANA KARYA SATYA                                   |
| 133 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | SURAT PERINTAH TUGAS  |
| 134 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR   |
| 135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN CALON PNS                                 |
| 136 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK  |
| 137 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN PPPK                                      |
| 138 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS  |
| 139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGAJUAN IJIN CUTI BAGI PNS  |
| 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS   |
| 141 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK  |
| 142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | PENGUSULAN KARTU SUAMI (KARSU) DAN KARTU ISTRI (KARIS)                |
| 143 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENYAMPAIAN BERKAS USUL PENETAPAN NIP CPNS                            |
| 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | PENGAJUAN IJIN CUTI BAGI PNS  |
| 145 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                                     |
| 146 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK  |
| 147 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN PPPK                                      |
| 148 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | PENDISTRIBUSIAN KARIS/KARSU, KARPEG, DAN KPT                          |
| 149 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK  |
| 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SURAT PERINTAH TUGAS  |
| 151 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                                     |
| 152 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR   |
| 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS                              |

|                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 154                       | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 155                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 156                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 157                       | 4     | 4     | 4     | 1     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | SURAT PERINTAH TUGAS                                   |
| 158                       | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 2     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK                         |
| 159                       | 4     | 4     | 4     | 1     | 4     | 4     | 3     | 4     | 1     | 1     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | SURAT PERINTAH TUGAS                                   |
| 160                       | 3     | 4     | 4     | 2     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK                         |
| 161                       | 4     | 4     | 4     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | PENGUSULAN KARTU SUAMI (KARSU) DAN KARTU ISTRI (KARIS) |
| 162                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 163                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | MUTASI PNS ANTAR DAERAH                                |
| 164                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR                          |
| 165                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS               |
| 166                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 167                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS               |
| 168                       | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | PENGAJUAN IJIN CUTI BAGI PNS                           |
| 169                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     | PENGUSULAN SATYALANCANA KARYA SATYA                    |
| 170                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR                          |
| 171                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS               |
| 172                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 173                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK                         |
| 174                       | 2     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 2     | 3     | 3     | 3     | 2     | 3     | 3     | 2     | 3     | 3     | 3     | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 175                       | 3     | 3     | 3     | 2     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR                          |
| 176                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS                          |
| 177                       | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS                      |
| 178                       | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK                         |
| ΣNilai /Unsur             | 663   | 670   | 664   | 630   | 637   | 645   | 664   | 684   | 688   | 688   | 666   | 658   | 662   | 668   | 653   | 653   | 677   | 668   | 651   |  |
| NRR / Unsur               | 3,725 | 3,764 | 3,730 | 3,539 | 3,579 | 3,624 | 3,730 | 3,843 | 3,865 | 3,865 | 3,742 | 3,697 | 3,719 | 3,753 | 3,689 | 3,669 | 3,803 | 3,753 | 3,657 |  |
| NRR tertbg/ unsur         | 0,410 | 0,414 | 0,410 | 0,389 | 0,394 | 0,399 | 0,410 | 0,423 | 0,425 | 0,425 | 0,412 | 0,407 | 0,409 | 0,413 | 0,406 | 0,404 | 0,418 | 0,413 | 0,402 | *)   |
|                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3,694  |
| <b>IKM Unit pelayanan</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>92,340</b>  |

**Keterangan :**

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- \*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- \*\*) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi  
Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang  
per unsur = NRR per unsur x 0,11

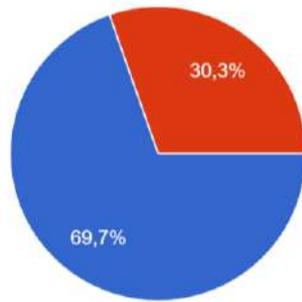
| No.          | UNSUR PELAYANAN                         | NILAI RATA-RATA | Nilai SKM Per Unsur | NRR TERTIMBANG |
|--------------|---|-----------------|---------------------|----------------|
| U1-2         | Persyaratan                             | 3,744           | 93,61               | 0,41188        |
| U3           | Prosedur                                | 3,730           | 93,26               | 0,41034        |
| U4-7         | Waktu/Kecepatan Pelayanan               | 3,618           | 90,45               | 0,39798        |
| U8-10        | Biaya/Tarif                             | 3,858           | 96,44               | 0,42434        |
| U11          | Produk Layanan                          | 3,742           | 93,54               | 0,41157        |
| U12-13       | Kompetensi Pelaksana                    | 3,708           | 92,70               | 0,40787        |
| U14          | Perilaku Pelaksana                      | 3,753           | 93,82               | 0,41281        |
| U15-17       | Sarana dan Prasarana                    | 3,720           | 93,01               | 0,40924        |
| U18-19       | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,705           | 92,63               | 0,40756        |
| <b>Total</b> |   |                 |                     | <b>3,6936</b>  |

**Kategori Mutu Pelayanan :**

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,01 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,00
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

### Jenis Kelamin

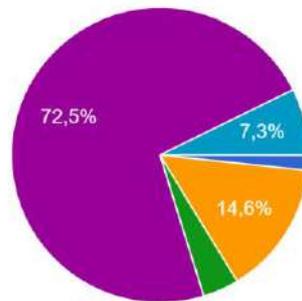
178 jawaban



- Laki-Laki
- Perempuan

### Pendidikan Terakhir

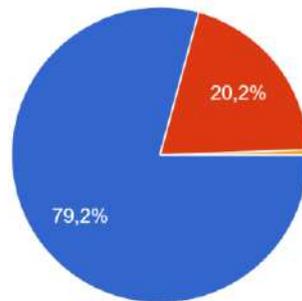
178 jawaban



- SD
- SMP
- SMA
- D1,D2,D3
- S1
- S2 keatas

### Pekerjaan

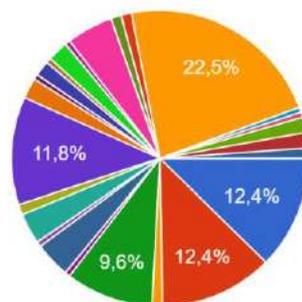
178 jawaban



- PNS
- PPPK
- Non PNS/PPPK

### Jenis Layanan yang sudah/pernah diurus

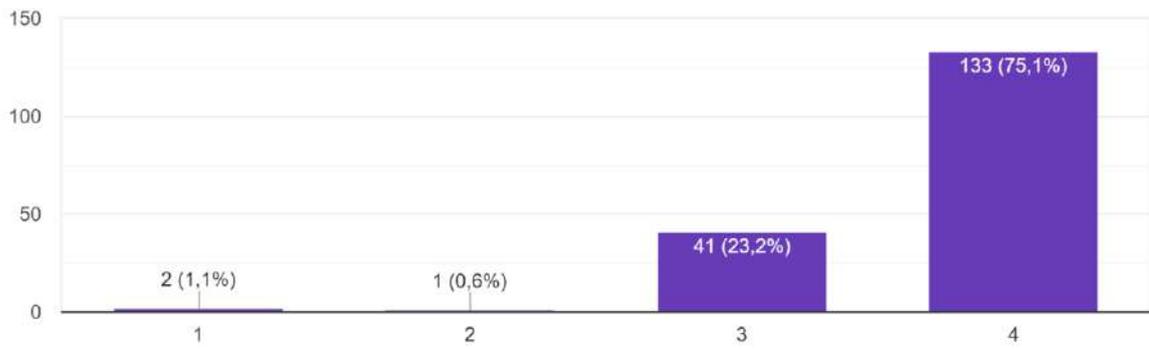
178 jawaban



- SURAT PERINTAH TUGAS
- KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELA...
- KEGIATAN DIKLAT TEKNIS FUNGSI...
- PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR
- PEMBERIAN SURAT KETERANGAN...
- PENERBITAN SURAT KETERANGA...
- PENERBITAN SURAT KETERANGA...
- PENERBITAN SURAT REKOMENDA...

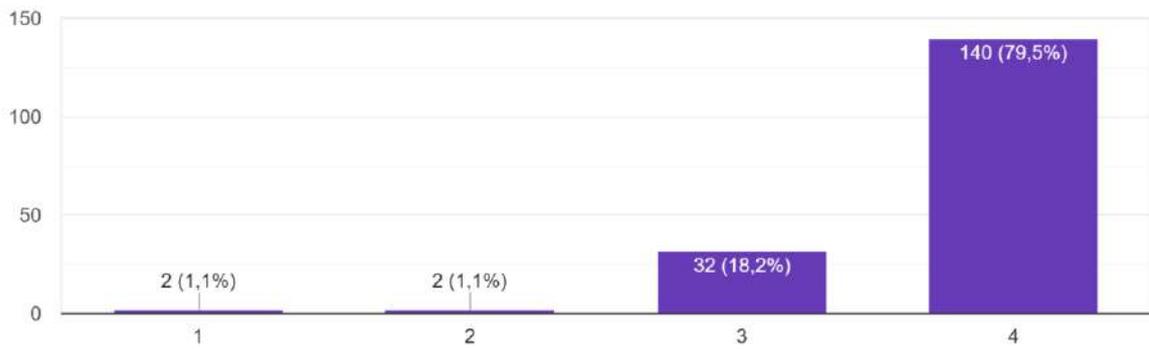
Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan standar pelayanannya/ jenis pelayanannya?

177 jawaban



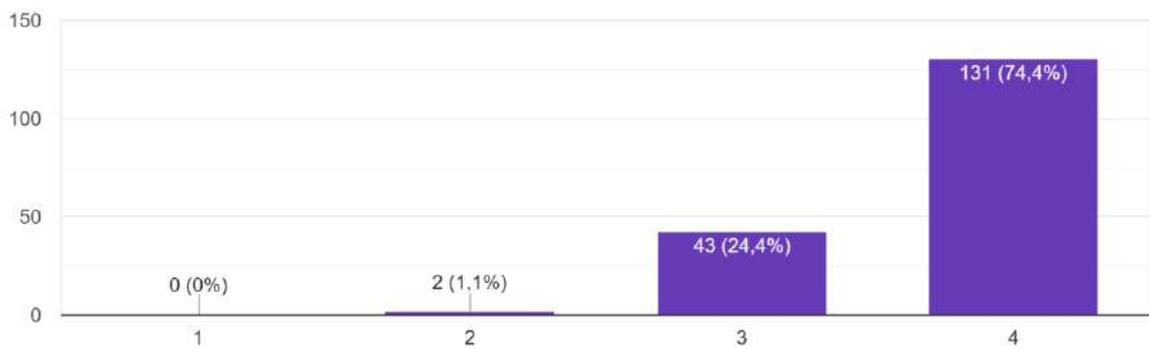
Apakah persyaratan pelayanan tertera dengan jelas,detail, dan lengkap ?

176 jawaban



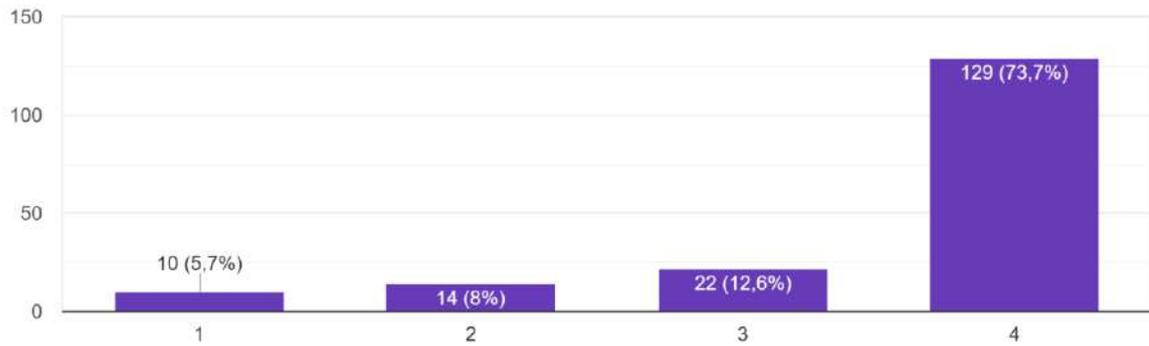
Bagaimana pendapat saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?

176 jawaban



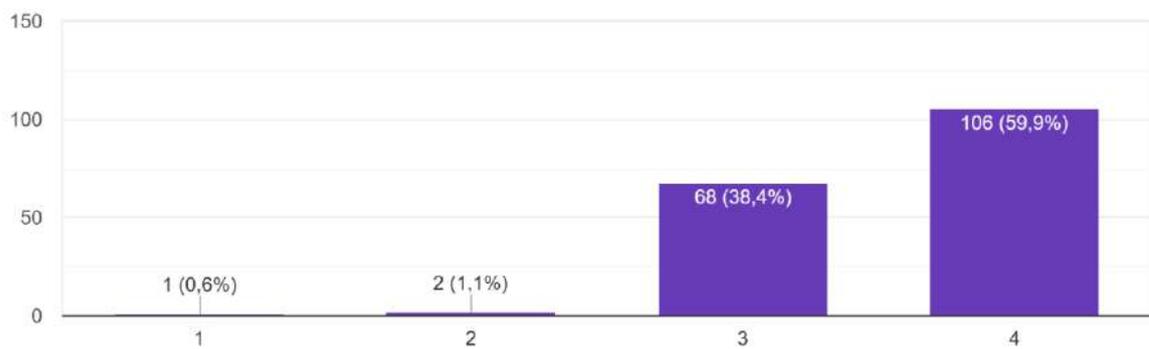
Apakah petugas menawarkan jasa untuk mempercepat proses layanan?

175 jawaban



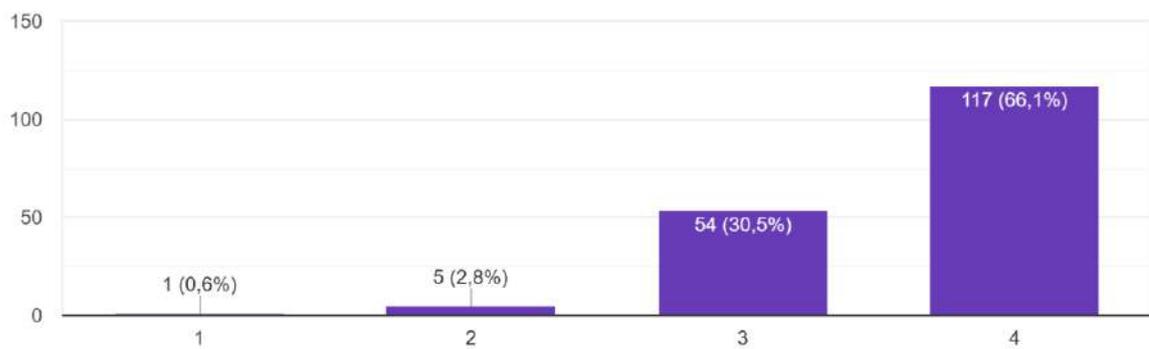
Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?

177 jawaban



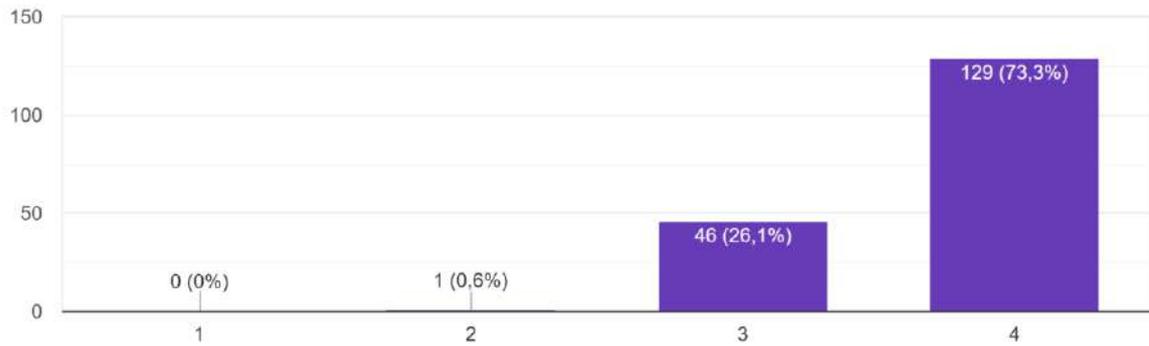
Apakah proses penyelesaian pelayanan sudah tepat waktu sesuai standar pelayanan yang dijanjikan?

177 jawaban



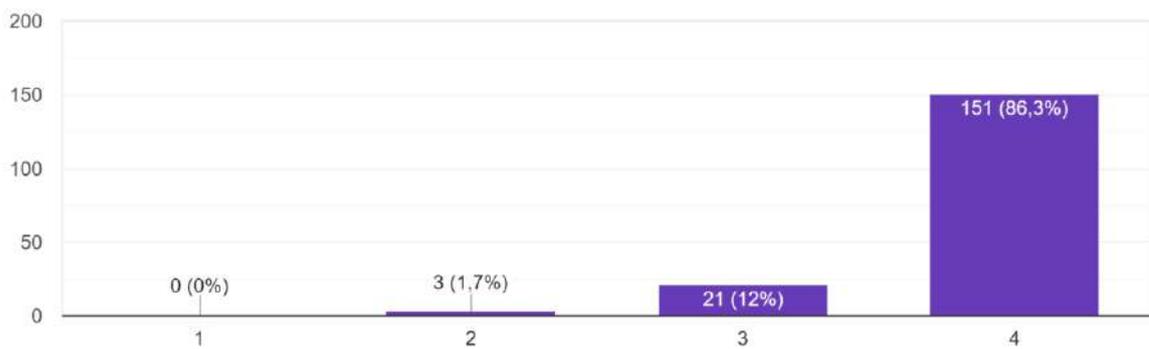
Apakah jam buka pelayanan sudah tepat waktu sesuai standar pelayanan yang dijanjikan?

176 jawaban



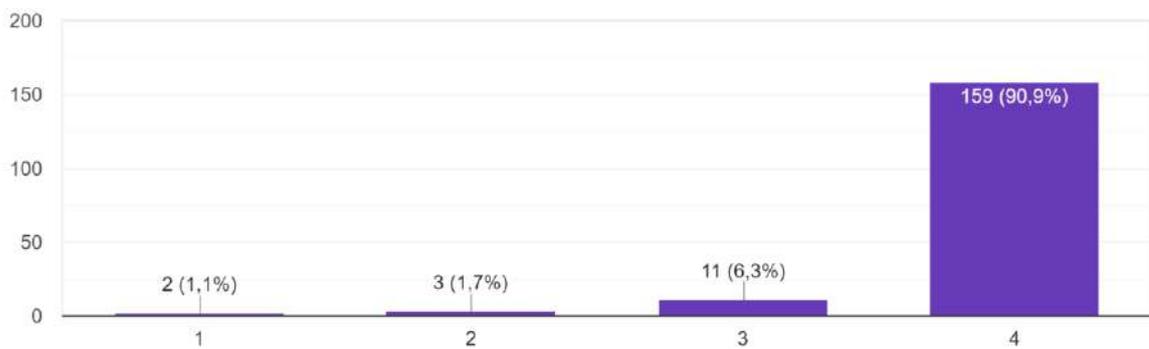
Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?

175 jawaban



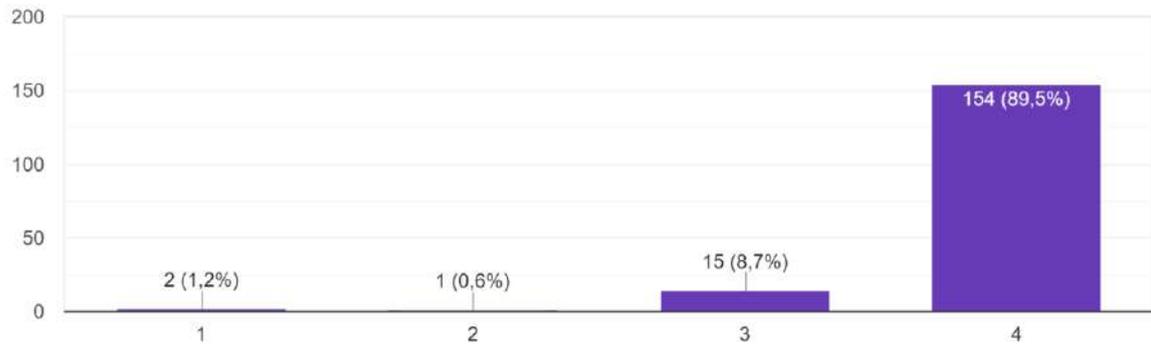
Apakah petugas menawarkan tambahan biaya di luar resmi (pungli) untuk mempercepat proses?

175 jawaban



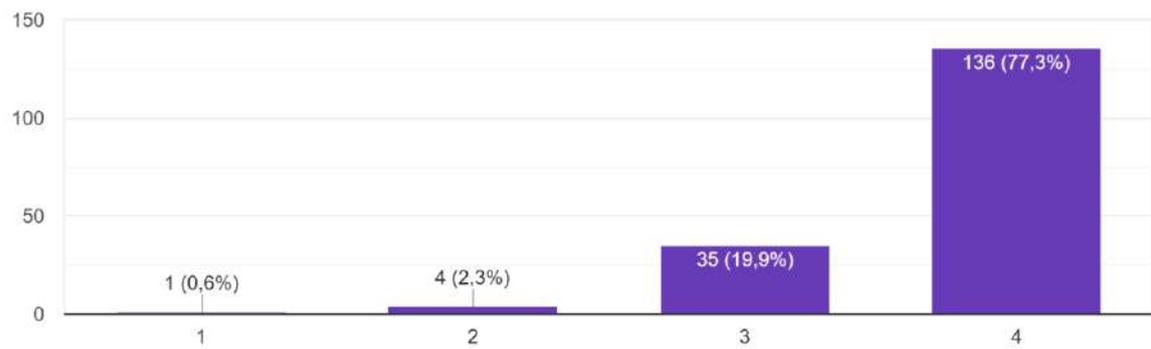
Apakah masih terdapat praktek percaloan?

172 jawaban



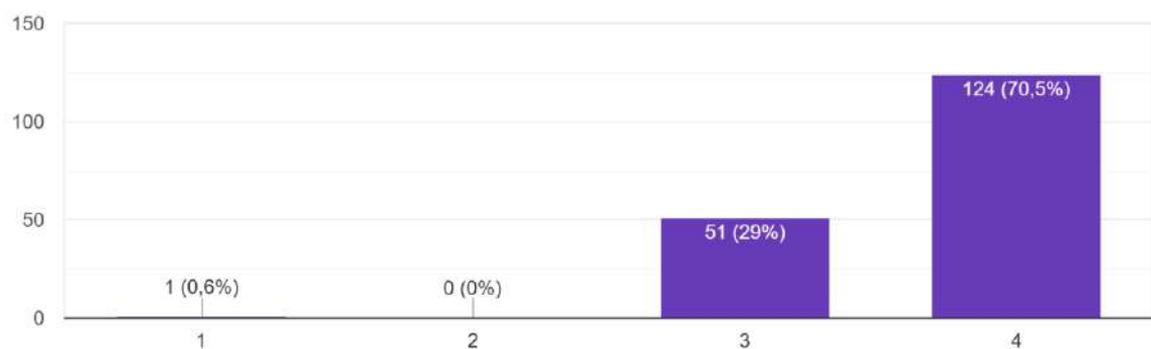
Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

176 jawaban



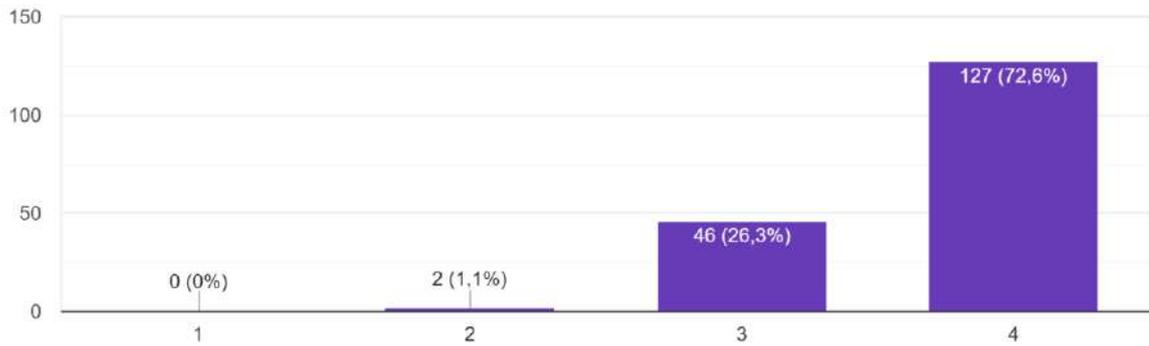
Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?

176 jawaban



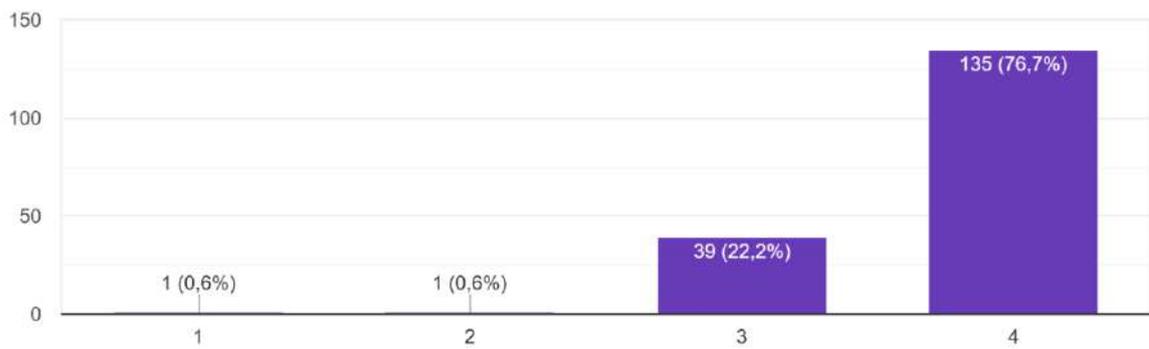
Petugas menjawab pertanyaan/keluhan kita dengan cepat, tepat, dan lengkap

175 jawaban



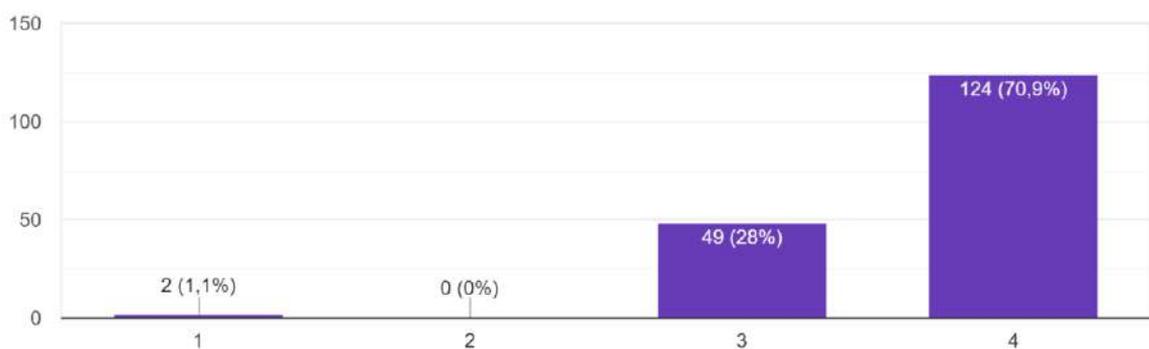
Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?

176 jawaban



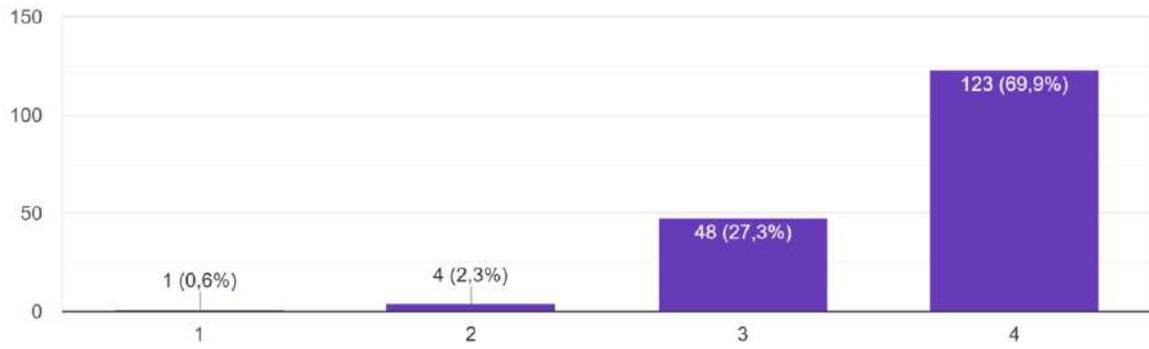
Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan?

175 jawaban



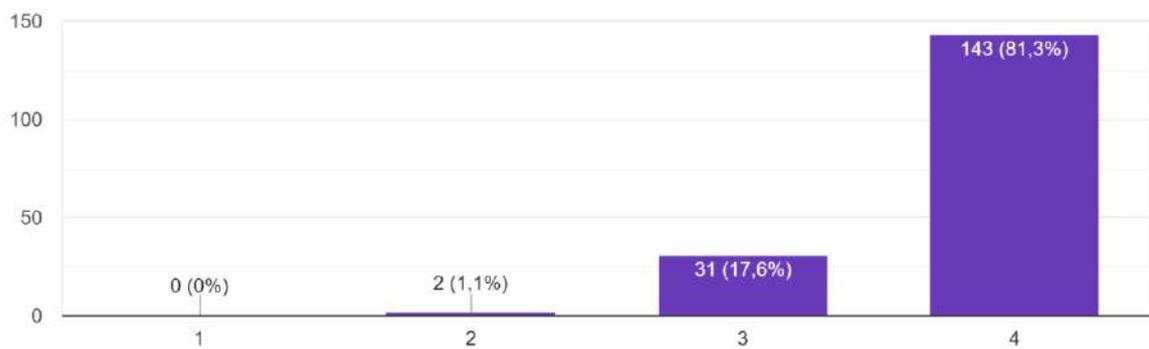
Pelayanan tidak perlu antri yang lama dan membosankan

176 jawaban



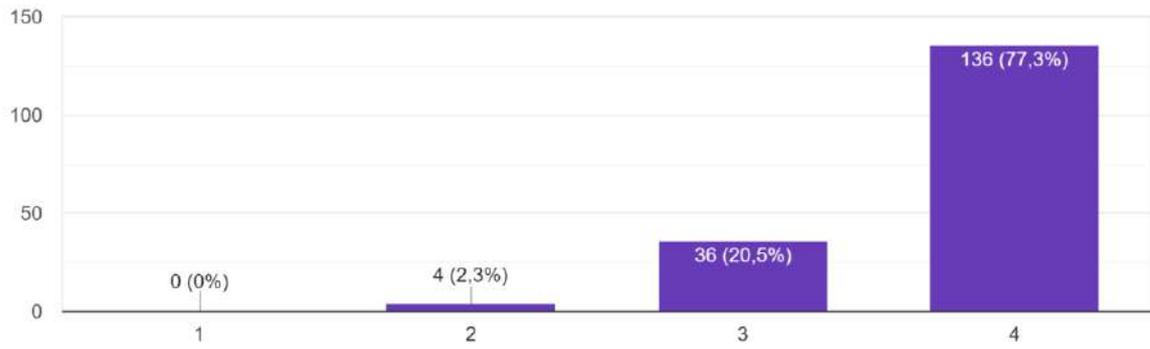
Apakah teknologi/aplikasi yang digunakan untuk mempercepat layanan bermanfaat ?

176 jawaban



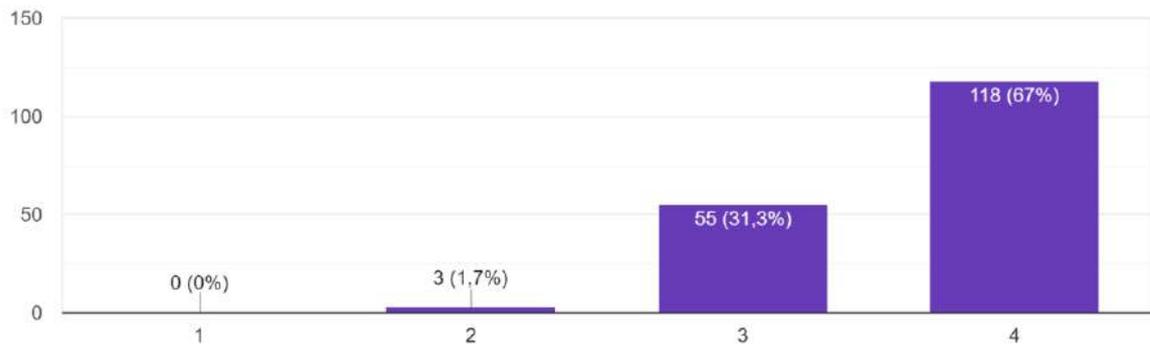
Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

176 jawaban



Pengaduan (komplain) sudah ditindaklanjuti (diselesaikan) oleh unit pelayanan.

176 jawaban



# Survei Kepuasan Masyarakat

Mohon partisipasi Saudara untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep periode Semester II Tahun 2023

*\* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi*

---

1. Nama Lengkap \*

---

2. Umur \*

---

3. Jenis Kelamin \*

*Tandai satu oval saja.*

- Laki-Laki  
 Perempuan

4. Pendidikan Terakhir \*

*Tandai satu oval saja.*

- SD  
 SMP  
 SMA  
 D1,D2,D3  
 S1  
 S2 keatas

5. Pekerjaan \*

*Tandai satu oval saja.*

- PNS  
 PPPK  
 Non PNS/PPPK

6. Nama OPD Asal (Misal : Dinas A, Kecamatan A, dll)

---

## 7. Jenis Layanan yang sudah/pernah diurus \*

Tandai satu oval saja.

- SURAT PERINTAH TUGAS
- KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
- KEGIATAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN NON PROGRAM
- PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR
- PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BELAJAR
- PENERBITAN SURAT KETERANGAN BELAJAR BAGI CPNS
- PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG IJIN BELAJAR/IKATAN DINAS/TUGAS BELAJAR
- PENERBITAN SURAT REKOMENDASI BAGI PNS ATAU NON PNS
- PENYUSUNAN KEBUTUHAN/FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
- PENETAPAN SK PENGANGKATAN CALON PNS
- PENYAMPAIAN BERKAS USUL PENETAPAN NIP CPNS
- PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN CALON PNS
- PENYAMPAIAN BERKAS USUL PENETAPAN NI PPPK
- PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK
- PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN PPPK
- PENETAPAN SK PEMBERHENTIAN PPPK
- PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
- BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPRI SUMENEP
- PENGELOLAAN SEWA GEDUNG KORPRI DAN SANTUNAN BAGI ANGGOTA KORPRI
- PENGUSULAN SATYALANCANA KARYA SATYA
- PENGUSULAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL (KARPEG)
- PENGUSULAN KARTU SUAMI (KARSU) DAN KARTU ISTRI (KARIS)
- PENGUSULAN KARTU PESERTA TASPEN (KPT)
- PENGAJUAN IJIN CUTI BAGI PNS
- PENGAJUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PNS
- PENGAJUAN IJIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
- PROSES PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN IJIN ATAU KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
- PENDISTRIBUSIAN KARIS/KARSU, KARPEG, DAN KPT
- PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
- PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PNS
- PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM JABATAN NEGERI
- PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES ATAU MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN
- LAYANAN PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN
- PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS
- SELEKSI PENGISIAN JPT PRATAMA
- IZIN PENCALONAN KEPALA DESA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
- MUTASI PNS ANTAR DAERAH
- MUTASI DALAM DAERAH (PELAKSANA)
- PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
- PENINJAUAN MASA KERJA
- PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT KEPALA DESA

## 8. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan standar pelayanannya/ jenis pelayanannya?

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida     Sangat Sesuai

9. Apakah persyaratan pelayanan tertera dengan jelas,detail, dan lengkap ?

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida     Sangat Jelas

10. Bagaimana pendapat saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida     Sangat Mudah

11. Apakah petugas menawarkan jasa untuk mempercepat proses layanan?

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Sani     Tidak Ada

12. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida     Sangat Cepat

13. Apakah proses penyelesaian pelayanan sudah tepat waktu sesuai standar pelayanan yang dijanjikan?

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Serii     Sangat Tepat

14. Apakah jam buka pelayanan sudah tepat waktu sesuai standar pelayanan yang dijanjikan?

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Serii     Sangat Tepat

15. Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Sani     Gratis

16. Apakah petugas menawarkan tambahan biaya di luar resmi (pungli) untuk mempercepat proses?

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Sani     Tidak Ada

17. Apakah masih terdapat praktek percaloan?

*Tandai satu oval saja.*

1 2 3 4  
Baik     Tidak Ada

18. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

*Tandai satu oval saja.*

1 2 3 4  
Tidak     Sesuai

19. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?

*Tandai satu oval saja.*

1 2 3 4  
Tidak     Sangat Kompeten

20. Petugas menjawab pertanyaan/keluhan kita dengan cepat, tepat, dan lengkap

*Tandai satu oval saja.*

1 2 3 4  
Tidak     Selalu

21. Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?

*Tandai satu oval saja.*

1 2 3 4  
Tidak     Sangat Sopan dan Sangat Ramah

22. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan?

*Tandai satu oval saja.*

1 2 3 4  
Buruk     Sangat Baik

23. Pelayanan tidak perlu antri yang lama dan membosankan

*Tandai satu oval saja.*

1 2 3 4  
Pantula     Sangat Lancar

24. Apakah teknologi/aplikasi yang digunakan untuk mempercepat layanan bermanfaat ?

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida     Sangat Bermanfaat

25. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida     Dikelola dengan baik

26. Pengaduan (komplain) sudah ditindaklanjuti (diselesaikan) oleh unit pelayanan.

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida     Sangat Cepat

---

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

**LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
PADA BKPSDM KABUPATEN SUMENEP  
SEMESTER II TAHUN 2023**

**I. Pendahuluan**

**I.1 Gambaran Umum**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan akselerator bagi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Kepegawaian serta pelaksanaan fungsi Perencanaan dan penyusunan program, pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan kegiatan serta evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 yaitu :

**“Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”**

Sejalan dengan Visi tersebut di atas, maka Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah:

- 1) Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdayasaing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan;
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan dari Hulu ke Hilir;
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat;
- 4) Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal;
- 5) Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan dan Kepulauan;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membantu Bupati dalam bidang kepegawaian wajib ikut serta mewujudkan visi kabupaten Sumenep melalui misi yang ke-3 (tiga), yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat”** dengan tujuan: **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif”** dengan menggunakan indikator kinerja utama berupa *Indeks Reformasi Birokrasi (RB)*.

Sasaran dari misi ke-3 ini adalah meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis E-government melalui pengembangan kapasitas Aparatur

Sipil Negara pemerintah daerah sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan. Ada pun indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mendukung proses mewujudkan misi ke-3 ini antara lain : Indeks SPBE, Nilai IKM, Indeks Profesional Aparatur, Nilai SAKIP, Opini Atas Audit BPK, dan Tingkat Maturitas SPIP.

## **I.2 Tugas dan Fungsi.**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan pada unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. perumusan kebijakan dan penetapan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan pengadaan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- d. penyelenggaraan kegiatan mutasi kepegawaian;
- e. pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- g. penyelenggaraan pembinaan kegiatan Sekretariat KORPRI;
- h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

## **I.3 Jenis-jenis Pelayanan :**

### **1. Pelayanan Administrasi Kepegawaian**

- **Layanan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi**
  - ✓ PENYUSUNAN KEBUTUHAN/FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
  - ✓ PENETAPAN SK PENGANGKATAN CALON PNS
  - ✓ PENYAMPAIAN BERKAS USUL PENETAPAN NIP CPNS
  - ✓ PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN CALON PNS
  - ✓ PENYAMPAIAN BERKAS USUL PENETAPAN NI PPPK
  - ✓ PENETAPAN SK PENGANGKATAN PPPK
  - ✓ PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN PPPK
  - ✓ PENETAPAN SK PEMBERHENTIAN PPPK

- ✓ PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
  - ✓ BANTUAN ANGGARAN PROGRAM KERJA DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPRI SUMENEP
  - ✓ PENGELOLAAN SEWA GEDUNG KORPRI DAN SANTUNAN BAGI ANGGOTA KORPRI
- **Layanan Bidang Mutasi dan Promosi**
    - ✓ LAYANAN PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN
    - ✓ PENETAPAN SK KENAIKAN PANGKAT PNS
    - ✓ SELEKSI PENGISIAN JPT PRATAMA
    - ✓ IZIN PENCALONAN KEPALA DESA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
    - ✓ MUTASI PNS ANTAR DAERAH
    - ✓ MUTASI DALAM DAERAH (PELAKSANA)
    - ✓ PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
    - ✓ PENINJAUAN MASA KERJA
    - ✓ PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT KEPALA DESA
- **Layanan Bidang Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan**
    - ✓ PENGUSULAN SATYALANCANA KARYA SATYA
    - ✓ PENGUSULAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL (KARPEG)
    - ✓ PENGUSULAN KARTU SUAMI (KARSU) DAN KARTU ISTRI (KARIS)
    - ✓ PENGUSULANKARTU PESERTA TASPEN (KPT)
    - ✓ PENGAJUAN IJIN CUTI BAGI PNS
    - ✓ PENGAJUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PNS
    - ✓ PENGAJUAN IJIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
    - ✓ PROSES PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN IJIN ATAU KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
    - ✓ PENDISTRIBUSIAN KARIS/KARSU, KARPEG, DAN KPT
    - ✓ PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
    - ✓ PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PNS
    - ✓ PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM JABATAN NEGERI
    - ✓ PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES ATAU MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN
- **Layanan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur**
    - ✓ SURAT PERINTAH TUGAS
    - ✓ KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

- ✓ KEGIATAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN NON PROGRAM
- ✓ PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR
- ✓ PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BELAJAR
- ✓ PENERBITAN SURAT KETERANGAN BELAJAR BAGI CPNS
- ✓ PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG IJIN BELAJAR/IKATAN DINAS/TUGAS BELAJAR
- ✓ PENERBITAN SURAT REKOMENDASI BAGI PNS ATAU NON PNS

## **2. Pelayanan Informasi Kepegawaian**

- Informasi Data Statistik dan Biodata Pegawai
- Penyajian Tata Naskah Pegawai
- Penyajian Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian
- Informasi Kepegawaian berupa Brosur, Leaflet Kepegawaian
- Data Dan Informasi secara elektronik melalui Aplikasi SIASN/SAPK/SIMPEG/SIC/SILAHKAN/SIAGA/SIC
- Informasi Kepegawaian melalui konsultasi kebijakan operasional di bidang kepegawaian.

### **I.4. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Permenpan RB Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Mystery Shopping Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

## **II. Hasil Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**

### **II.1 Profil Responden untuk Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini berdasarkan data dari 178 orang responden yang telah disurvei. Dipilih masyarakat khususnya ASN yang akan/telah memakai jasa pelayanan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep. Dari total 178 responden, 124 responden atau 69,7% berjenis kelamin laki-laki dan 54 orang atau 30,3 % berjenis kelamin perempuan.

Adapun latar belakang tingkat pendidikan yang dimiliki yaitu S-1 dengan jumlah responden terbanyak yakni sebanyak 129 orang responden atau 72,5% ini menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan S-1 mendominasi dalam pengisian kuesioner sedangkan untuk SMA sebanyak 14,6%, D1,D2,D3 sebanyak 3,93 %, untuk SD sebanyak 1,69% serta responden dengan data responden pendidikan S2 keatas sebanyak 7,3 %.

## II.2 Indeks Unit Pelayanan dan Indeks Per Unsur Pelayanan

Dari hasil survey yang dilaksanakan, diperoleh nilai SKM unit pelayanan dengan nilai **92,34**. Dari hasil nilai tersebut bisa diketahui bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep **Mutu Pelayanannya tergolong A (Sangat Baik)**. Adapun nilai rata-rata menurut unsur pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan  
Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya mendapat nilai rata-rata 3,744.
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan  
Prosedur Pelayanan yang merupakan kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan mendapat nilai rata-rata 3,730.
3. Kecepatan Pelayanan  
Kecepatan Pelayanan adalah target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan mendapat nilai rata-rata 3,618.
4. Biaya/Tarif  
Kewajaran Biaya Pelayanan adalah keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan dengan nilai rata-rata 3,858.
5. Produk Layanan

Produk Layanan adalah kesesuaian Produk Pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan mendapat nilai rata-rata 3,742.

6. Kompetensi Pelaksana

Kemampuan Petugas Pelayanan adalah tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat mendapat nilai rata-rata 3,708.

7. Perilaku Pelaksana

Kesopanan dan Keramahan Petugas merupakan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati dengan nilai rata-rata 3,753.

8. Kualitas Sarana Prasarana

Kenyamanan Lingkungan adalah kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan dengan nilai rata-rata 3,720.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah pelapor yang menyampaikan keluhan melalui telepon, email, dan ataupun mengisi form yang telah tersedia mendapat nilai rata-rata 3,705.

### **II.3 Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan**

Secara umum nilai rata-rata dari unsur pelayanan yang diperoleh oleh tiap unsur adalah sangat baik. Dari 9 unsur penilaian, ada 1 unsur yang skornya masih dibawah 3,7 jika dibandingkan skor untuk unsur yang lain dan masih dapat diperbaiki lagi, antara lain:

- ✓ Waktu/Kecepatan Pelayanan

#### **II.3.1 Kecepatan Pelayanan**

Waktu/Kecepatan Pelayanan mendapat nilai rata-rata 3,648 dengan Nilai Mutu Pelayanan sebesar 90,45. Target waktu pelayanan ini sangat baik, tetapi hal tersebut dapat ditingkatkan dengan mencari solusi dari masalah kecepatan pelayanan. Apabila masalah berasal dari intern Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, masalah tersebut akan segera diselesaikan, sehingga diharapkan meningkatkan kepuasan masyarakat.

### **III. Penutup.**

Demikian hasil penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Semester II Tahun 2023, semoga hasil survey ini dapat menjadi informasi dan bahan evaluasi dalam menjaga kualitas dan meningkatkan pelayanan masyarakat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di waktu mendatang.

Sumenep, 15 Desember 2023

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SUMENEP**



**ARIF FIRMANTO ,S.TP.,M.Si**

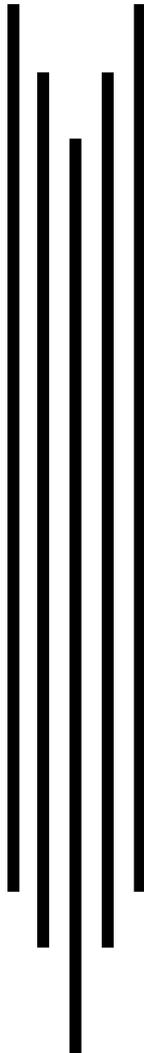
Pembina Tingkat I

NIP. 19780518 200501 1 010



**bkpsdm**

**LAPORAN TINDAK LANJUT  
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
Semester II  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. DR. CIPTO NO. 40 TELP. ( 0328 ) 664526

Email : [bkdsunenep@gmail.com](mailto:bkdsunenep@gmail.com) website : [bkpsdm.sumenepkab.go.id](http://bkpsdm.sumenepkab.go.id)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggaraan layanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan.

Kepuasan masyarakat adalah suatu keadaan menyangkut keinginan, harapan dan kebutuhan pengguna layanan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Pengukuran kepuasan masyarakat merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila masyarakat pengguna layanan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dipastikan tidak efektif dan tidak efisien.

### **1.2 DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### **1.3 SASARAN**

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

### **1.4 TUJUAN**

1. Mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.
2. Melakukan tindak lanjut hasil survey Kepuasan Masyarakat guna meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

## BAB II

### PELAKSANAAN, HASIL SURVEI DAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

#### 2.1 PELAKSANAAN SURVEI

Pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, dengan cara mengisi kuisisioner setelah masyarakat menerima pelayanan. Data dikumpulkan dengan selang waktu bulan Juli s.d Desember 2023.

#### 2.2 HASIL SURVEI

Berdasarkan rekapitulasi hasil survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan selang waktu bulan Juli s.d Desember 2023 dengan menggunakan kriteria penilaian Sangat Baik (4), Baik (3), Cukup (2), dan Kurang (1). Diperoleh data sebagai berikut :

| NO | SUB UNSUR                  | HASIL PENILAIAN | PERTANYAAN  |
|----|----------------------------|-----------------|---|
| 1  | Persyaratan                | Sangat Sesuai   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan standar pelayanannya/ jenis pelayanannya?</li> <li>2. Apakah persyaratan pelayanan tertera dengan jelas,detail, dan lengkap ?</li> </ol>   |
| 2  | Prosedur                   | Mudah           | Bagaimana pendapat saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?  |
| 3  | Waktu/ Kecepatan Pelayanan | Cepat           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah petugas menawarkan jasa untuk mempercepat proses layanan?</li> <li>2. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?</li> <li>3. Apakah proses penyelesaian pelayanan sudah tepat waktu sesuai standar pelayanan yang dijanjikan?</li> <li>4. Apakah jam buka pelayanan sudah tepat waktu sesuai standar pelayanan yang dijanjikan?</li> </ol> |
| 4  | Biaya/Tarif                | Gratis          | 1. Bagaimana pendapat saudara tentang   |

|   |   |                      |   |
|---|---|----------------------|---|
|   |   |                      | <p>kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?</p> <p>2. Apakah petugas menawarkan tambahan biaya di luar resmi (pungli) untuk mempercepat proses?</p> <p>3. Apakah masih terdapat praktek percaloan?</p>  |
| 5 | Produk Layanan                          | Sangat Sesuai        | Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan  |
| 6 | Kompetensi Pelaksana                    | Sangat Kompeten      | <p>1. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?</p> <p>2. Petugas menjawab pertanyaan/keluhan kita dengan cepat, tepat, dan lengkap</p>  |
| 7 | Perilaku Pelaksana                      | Sopan dan Ramah      | Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?  |
| 8 | Sarana dan Prasarana                    | Sangat Baik          | <p>1. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan?</p> <p>2. Pelayanan tidak perlu antri yang lama dan membosankan</p> <p>3. Apakah teknologi/aplikasi yang digunakan untuk mempercepat layanan bermanfaat ?</p> |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Dikelola dengan baik | <p>1. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?</p> <p>2. Pengaduan (komplain) sudah ditindaklanjuti (diselesaikan) oleh unit pelayanan.</p>  |

1. Pada poin persyaratan pelayanan, menyangkut kesesuaian persyaratan pelayanan dengan standar pelayanannya mendapatkan hasil penilaian Sangat Sesuai.
2. Pada point kemudahan prosedur, menyangkut persyaratan berkas dan prosedur yang diberikan petugas kepada masyarakat dalam beberapa hal ini mendapat penilaian mudah oleh masyarakat
3. Pada point kecepatan waktu, penyelesaian menyangkut waktu yang diberikan petugas kepada masyarakat dalam hal penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat, hal mendapat nilai cepat.
4. Pada point biaya/tarif, dalam pelayanan oleh aparatur negara yang dilakukan oleh petugas kami telah berkomitmen bahwa kami tidak melakukan pungutan dan kami mendapat nilai Gratis oleh masyarakat
5. Pada point Produk Layanan, masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai

diharapkan maka kami mendapat nilai sesuai yang diharapkan.

6. Pada Point Kemampuan petugas, kemampuan petugas dalam melakukan pelayanan memberikan informasi kepada masyarakat sangat kompeten dan informatif dan kami mendapat nilai Kompeten
  7. Pada point perilaku Petugas, petugas berperilaku sopan dan ramah ketika memberikan pelayanan dan hasil survei mendapatkan sopan dan ramah
  8. Pada point sarana dan prasarana, kualitas sarana baik ruang tunggu, penyediaan parkir, dan teknologi layanan menghasilkan nilai sangat baik.
  9. Pada point pengaduan pelayanan, pengaduan pelayanan yang kami berikan terkait telp call center / email / wa mendapatkan nilai yang sangat baik.
- Kepuasan pelayanan secara keseluruhan mendapat hasil penilaian sangat bagus.

### **2.3 TINDAK LANJUT HASIL SURVEI**

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep mendapat kriteria penilaian rata-rata sangat bagus. Namun dari hasil tersebut didapatkan beberapa keluhan atau ketidakpuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep khususnya di unsur Waktu Pelayanan karena dibandingkan dengan unsur yang lain, unsur Waktu Pelayanan mendapat nilai paling rendah. Berdasarkan hal tersebut tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menghimbau pada segenap Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep untuk Melakukan percepatan pada tiap tahap layanan yang pelaksanaannya tidak menunggu pihak ketiga (Tanda Tangan Bupati, Persetujuan BKN, dll)
2. Segera melakukan konfirmasi terhadap pengguna layanan apabila terdapat permasalahan yang menghambat kecepatan layanan
3. Menciptakan komunikasi yang komprehensif pada setiap pengguna layanan;
4. Menghimbau pada segenap Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep untuk Tidak menunda nunda pekerjaan yang sudah selesai dan segera menyerahkan hasil layanan kepada penerima layanan khususnya ASN Kabupaten Sumenep
5. Menghimbau pada segenap Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep untuk Lebih *aware* dan tanggap terhadap keluhan/komplain untuk meminimalisir ketidakpuasan dari pengguna layanan

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar penyempurnaan dan peningkatan kualitas serta inovasi pelayanan publik.

Sumenep, 18 Desember 2023

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SUMENEP**



**ARIF FIRMANTO ,S.TP.,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19780518 200501 1 010